

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masalah kemiskinan menjadi salah satu masalah mendasar yang menjadi bagian dari isu global dan perhatian pemerintah di berbagai negara. Kemiskinan menjadi masalah yang kompleks, multifaset dan menjadi tantangan pembangunan terbesar yang harus menjadi perhatian dari banyak negara di dunia, terutama negara berkembang seperti Indonesia (Sari & Dra. Lucia Indrawati, 2021). Pemerintah Indonesia sangat mementingkan terciptanya masyarakat adil dan makmur sesuai yang dimuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, dan semua program - program pembangunan yang dilaksanakan selama ini pada dasarnya semua dilakukan dengan tujuan yang sama terhadap upaya dalam pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sarvianto, 2020).

Penanggulangan kemiskinan sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Dimana situasi menghadapi kemiskinan ditangani, diputuskan dan dilaksanakan dengan cepat dan efektif oleh pemerintah daerah tanpa terlalu bergantung pada arahan dari pemerintah pusat (Rachmatullah et al., 2021). Dengan adanya peningkatan kewenangan daerah ini memberikan tanggung jawab dan fleksibilitas yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan strategis

penting terkait penanggulangan kemiskinan bersama dengan pemangku kepentingan lainnya.

Upaya penanggulangan kemiskinan ini berkaitan pada tujuan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk memberantas permasalahan yang ada melalui program-program Sustainable Development Goals (SDGs) yang salah satu target adalah mengentaskan kemiskinan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diimplementasikan sebagai program kerja dari tahun 2015 untuk 17 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 di masa depan (Azhari & Mashur, 2022).

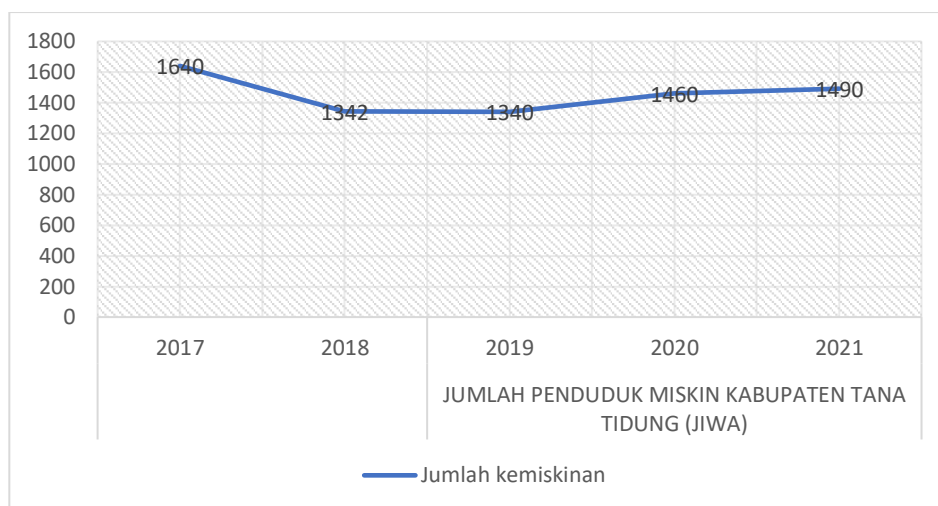
Bila ditinjau dari tujuan yang diharapkan dengan adanya SDGs diharapkan memprioritaskan isu-isu seperti kemiskinan. Menurut Sarvianto, (2020) dengan adanya SDGs yang dapat mengakhirinya melalui semua pembangunan, diasumsikan bahwa kemiskinan tidak ada dan terlihat pada kalimat “*that ending poverty*”. Maka dari itu, diharapkannya SDGs ini dapat menekan atau memperkecil angka kemiskinan yang saat ini menjadi isu global yang semakin menyatu dengan adanya globalisasi dan modernisasi.

Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tujuan pengentasan kemiskinan maka sesuai Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan maka dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota. Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku

kepentingan di tingkat pusat yang diketuai Wakil Presiden Republik Indonesia, yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan oleh semua pihak.

Dalam hal ini telah di programkan secara menyeluruh oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung, sehingga secara garis besar komitmen para Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagaimana yang disampaikan oleh Bappeda dan Litbang bahwa TKPKD telah ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 055/033/K-I/2017 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Maka dari itu, dilihat jumlah penduduk miskin selama terbentuknya TKPKD, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 1. 1 Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Tana Tidung tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa di tahun 2019, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 1340 jiwa sedangkan di tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebanyak 1640 jiwa. Hal ini dapat dilihat bahwa adanya

perbedaan di awal terbentuknya TKPKD di tahun kedua. Namun, setelah tahun 2019 terlihat jumlah penduduk miskin menunjukkan tren yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Terjadinya pandemik Covid-19 pada tahun 2020 sedikit memberikan dorongan bagi peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung. Akibatnya, pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tana Tidung kembali mengalami kenaikan. Maka dari itu, dapat dilihat lagi sejauhmana efektivitas dari TKPKD dalam mengurangi tingkat kemiskinan di daerah yang dapat memberikan suatu pandangan agar kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung dapat menurun dengan penanggulangan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana **Efektivitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tana Tidung untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Dalam Mewujudkan SDGs** sehingga dapat dilihat dari data BPS yang memiliki tren presentase meningkat setiap tahunnya dari tahun 2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk pertanyaan yaitu:

Bagaimana efektivitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam mengurangi tingkat kemiskinan untuk mewujudkan SDGs di Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui efektivitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam mengurangi tingkat kemiskinan untuk mewujudkan SDGs di Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di berbagai kalangan meliputi:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami informasi terkait efektivitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Tana Tidung dan dapat memberi masukan dan evaluasi kinerja bagi TKPKD Kabupaten Tana Tidung.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan melihat program penanggulangan kemiskinan.

### **1.5 Kajian Pustaka**

Pada bab ini akan di jelaskan, yang pertama yaitu kajian pustaka yang di gunakan sebagai struktur umum untuk menginterpretasikan masalah yang akan dipelajari dan memperjelas hubungan yang akan digunakan dalam menjelaskan

masalah yang berkaitan dengan organisasi penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kemiskinan untuk mewujudkan SDGs, dengan studi yang telah dipelajari sebelumnya. Kedua, kerangka teori, ini akan menjelaskan beberapa pendapat para ahli terkait dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Ketiga, definisi konseptual, ini menjelaskan secara abstrak melalui konsep peneliti yang diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran dalam penelitian ini. Keempat, definisi operasional, menjelaskan beberapa variabel dan parameter penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Faisal & Drs. Erman M, (2012) mengenai Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2011-2012. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dideskripsikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, kebijakan yang dikeluarkan oleh TKPK Kabupaten Meranti tentang penanggulangan kemiskinan mengidentifikasi bidang prioritas dan sasaran intervensi penanggulangan kemiskinan, menganalisis anggaran program penanggulangan kemiskinan, menyusun strategi penanggulangan kemiskinan, dan mengkoordinasikan upaya untuk pengentasan kemiskinan.

“Pelaksanaan Tupoksi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan” oleh Donna & Sujianto, (2014). Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan masalah kemiskinan yang terjadi dalam hal ini pada daerah Kabupaten Siak. Sesuai dengan tujuannya pelaksanaan tupoksi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Siak sudah

berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk laksana yang ada dalam Keputusan Bupati Siak Nomor 11/HK/KPTS/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak.

“Evaluasi Strategi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Metro (Studi Kasus di Kecamatan Metro Utara)” oleh Algasi, (2019). Strategi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro adalah strategi jangka panjang, tepat sasaran dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial yang fokus pada kebijakan pendidikan, kesehatan, ekonomi mikro dan makro.

Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Bhayu Pratama, Eko Priyo Purnomo dan Agustiyara (2020), mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Dalam upaya pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan SDGs maka Pemerintah Provinsi DIY memiliki 4 (empat) target yaitu : mengurangi proporsi kemiskinan disemua dimensi, menerapkan sistem perlindungan serta upaya perlindungan sosial bagi semua kalangan yang terdampak kemiskinan, menjamin adanya hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta kemudahan akses terhadap pelayanan dasar dan terakhir membangun ketahanan terhadap bencana, kejadian ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang berkategori miskin dan rentan miskin. Dengan keempat target diatas Pemerintah Provinsi DIY sudah melakukan upaya yang sejalan dan dikatakan sudah mampu mengurangi angka kemiskinan secara multidimensional.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Widodo (2021), mengenai Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan permasalahan terkait strategi komunikasi pemerintah dalam hal ini pada daerah Kebumen serta pengaruhnya terhadap pemanfaatan media sosial dan website yang dimiliki instansi atau lembaga terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam strategi komunikasi pemerintah yang tepat dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh komunikator, adanya aktor-aktor penting dengan memanfaatkan sosial media serta melibatkan langsung masyarakat untuk berdialog.

“Implementasi SDGs dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Temanggung” oleh Sari & Dra. Lucia Indrawati, (2021). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi indikator SDGs dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung. Analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk membentuk deskripsi sistematis dari data yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung cukup serius dalam menanggulangi dan mengurangi kemiskinan, terlihat dari menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung setiap tahunnya.

“Optimalisasi Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam Perspektif Diskresi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Kota Semarang” oleh Alfisyahrin, (2021). Dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi secara spesifik terkait peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang selaku *leading sector* dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Semarang. Pembahasan



penelitian sebagaimana berbagai keterlibatan OPD dalam program penanggulangan kemiskinan, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang sudah berkomitmen untuk penanggulangan kemiskinan. Dari sisi implementasi, integrasi data masih menjadi kendala, yang pada akhirnya berdampak buruk pada keberhasilan perumusan dan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

“Strategi Pengembangan Usaha Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Pekanbaru” oleh Azhari & Mashur, (2022). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari strategi pengembangan usaha yang diusung TKPK dalam pengentasan kemiskinan di Pekanbaru dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan usaha yang diusung TKPK tidak berjalan dengan baik. Adapun yang menjadi faktor penghambat dari strategi ini adalah komitmen TKPK yang masih kurang dalam tanggung jawabnya dan koordinasi antar *stakeholder* yang kurang baik.

“Penerapan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Polewali dalam Mengurangi Kemiskinan” oleh Nawir et al., (2022). Pembahasan pada penelitian ini adalah bagaimana strategi dari Pemerintah Desa Polewali dalam penerapan program SDGs untuk mengurangi angka kemiskinan dan hasil dari penelitian ini adalah sudah diterapkan dan sudah terlaksana dengan baik. Namun, implementasi SDGs yang masih belum dirasakan oleh warga Desa Polewali.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ghulam Zakiyyan Dzulqarnain, Dine Meigawati dan Yana Fajar Basori (2022) terkait Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan

Kemiskinan di Kota Sukabumi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana peneliti memberikan batasan dalam kajian penelitian yang berfokus pada permasalahan yaitu bagaimana implementasi program SDGs dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi. Dalam menentukan informan pada penelitian ini menggunakan rancangan *nonprobability sampling* dengan teknik *snowball sampling*. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan cara observasi, kemudian melakukan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini terdapat pada beberapa dimensi yang belum optimal berjalan. Dari dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, pelaksana SDGs di Kota Sukabumi masih belum dipahami mengenai SDGs yang lebih mendalam. Pada dimensi lain juga terdapat masih ada permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan

Tabel 1. 1 Penelitian-penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun, Jurnal dan Link	Judul	Hasil
1.	(Faisal & Drs. Erman M, 2012)	Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2011-2012	Kebijakan yang dikeluarkan oleh TKPK Kabupaten Meranti tentang penanggulangan kemiskinan mengidentifikasi bidang prioritas dan sasaran intervensi penanggulangan kemiskinan, menganalisis anggaran program penanggulangan kemiskinan, menyusun strategi penanggulangan kemiskinan, dan mengkoordinasikan upaya untuk pengentasan kemiskinan.
2.	(Donna & Sujianto, 2014), <i>Jurnal Administrasi Pembangunan</i> , Vol 2, No 3: Juli 2014 <a href="https://jap.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAP/article/view/2258">https://jap.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAP/article/view/2258</a>	Pelaksanaan Tupoksi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Pelaksanaan tupoksi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Siak sudah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk laksana yang ada dalam Keputusan Bupati Siak Nomor 11/HK/KPTS/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak.
3.	(Algasi, 2019), <i>JURNAL SIMPLEX</i> , Vol 2, No 3 (2019)	Evaluasi Strategi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Strategi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota

	<a href="http://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JS/article/view/418">http://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JS/article/view/418</a>	Kota Metro (Studi Kasus di Kecamatan Metro Utara)	Metro adalah strategi jangka panjang, tepat sasaran dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial yang fokus pada kebijakan Pendidikan, Kesehatan, ekonomi mikro dan makro.
4.	(N. B. Pratama et al., 2020), <i>Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora</i> , Vol 6, No 2: Agustus (2020) <a href="https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/sio/article/view/8045">https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/sio/article/view/8045</a>	Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta	Dalam upaya pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan SDGs maka Pemerintah Provinsi DIY memiliki 4 (empat) target yaitu : mengurangi proporsi kemiskinan disemua dimensi, menerapkan sistem perlindungan serta upaya perlindungan sosial bagi semua kalangan yang terdampak kemiskinan, menjamin adanya hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta kemudahan akses terhadap pelayanan dasar dan terakhir membangun ketahanan terhadap bencana, kejadian ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang berkategori miskin dan rentan miskin. Dengan keempat target diatas Pemerintah Provinsi DIY sudah melakukan upaya yang sejalan dan dikatakan sudah mampu mengurangi angka kemiskinan secara multidimensional.

5.	(Alfisyahrin, 2021), <i>Jurnal Media Administrasi</i> , Vol 3, No 1 (2021) <a href="http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/MAD/article/view/2720">http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/MAD/article/view/2720</a>	Optimalisasi Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam Perspektif Diskresi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Kota Semarang	Berbagai keterlibatan OPD dalam program penanggulangan kemiskinan, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang sudah berkomitmen untuk penanggulangan kemiskinan. Dari sisi implementasi, integrasi data masih menjadi kendala, yang pada akhirnya berdampak buruk pada keberhasilan perumusan dan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.
6.	(Widodo, 2021), <i>Jurnal SELASAR KPI: Referensi Media Komunikasi dan Dakwah</i> , Vol 1 No 1 (2021) <a href="http://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/selasar/article/view/312">http://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/selasar/article/view/312</a>	Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Strategi komunikasi pemerintah yang tepat dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh komunikator, adanya aktor-aktor penting dengan memanfaatkan sosial media serta melibatkan langsung masyarakat untuk berdialog.
7.	(Sari & Dra. Lucia Indrawati, 2021), <i>JPM</i> , Vol 2, No 4 (2021) <a href="http://smkn1magelang.sch.id/jpm/index.php/jpm/article/view/144">http://smkn1magelang.sch.id/jpm/index.php/jpm/article/view/144</a>	Implementasi SDGs dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Temanggung	Pemerintah Kabupaten Temanggung cukup serius dalam menanggulangi dan mengurangi kemiskinan, terlihat dari menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung setiap tahunnya

8.	(Dzulqarnain et al., 2022), <i>Jurnal Komunikasi &amp; Administrasi Publik</i> , Vol 9 No 1 (2022) <a href="https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/2505">https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/2505</a>	Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi	Beberapa dimensi belum optimal berjalan. Dari dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, pelaksana SDGs di Kota Sukabumi masih belum dipahami mengenai SDGs yang lebih mendalam. Pada dimensi lain juga terdapat masih ada permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan.
9.	(Nawir et al., 2022), <i>DEMOKRASI: Jurnal Ilmu Pemerintahan</i> , Vol 2, No 1 (2022) <a href="http://journal.uml.ac.id/DMKR/article/view/784">http://journal.uml.ac.id/DMKR/article/view/784</a>	Penerapan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Polewali dalam Mengurangi Kemiskinan	Strategi dari Pemerintah Desa Polewali dalam penerapan program SDGs untuk mengurangi angka kemiskinan dan hasil dari penelitian ini adalah sudah diterapkan dan sudah terlaksana dengan baik. Namun, implementasi SDGs yang masih belum dirasakan oleh warga Desa Polewali.
10.	(Azhari & Mashur, 2022), Vol 5, No 1: Januari-Juni 2022 <a href="http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1108">http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1108</a>	Strategi Pengembangan Usaha Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Pekanbaru	Strategi pengembangan usaha yang diusung TKPK tidak berjalan dengan baik. Adapun yang menjadi faktor penghambat dari strategi ini adalah komitmen TKPK yang masih kurang dalam tanggung jawabnya dan koordinasi antar stakeholder yang kurang baik.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas umumnya membahas tentang strategi penanggulangan kemiskinan. Perbedaan penelitian antara peneliti dengan yang

akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya hanya fokus membahas implementasi dari SDGs dalam penanggulangan kemiskinan dan strategi dari lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan membahas efektivitas dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang menangani penanggulangan kemiskinan apakah sudah sesuai dengan sasaran dalam memperkuat tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara.

## **1.6 Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan identifikasi dari teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Adapun penelitian ini telah mengidentifikasi sejumlah teori, diantaranya:

### **1.6.1 Efektivitas Organisasi**

#### **A. Definisi Efektivitas Organisasi**

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat diartikan efektif jika pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dengan memperhatikan waktu, tenaga, dll. Sondang P. Siagian (2001:24) yang berpendapat bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan

keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Selanjutnya menurut Georgopoulos dan Tannenbaum (dalam Steers, 1985:60) berpendapat bahwa efektivitas organisasi mengacu pada sejauh mana suatu organisasi, yang merupakan sistem sosial dengan semua sumber daya yang tersedia dan sarana tertentu dalam mencapai tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu antara anggotanya. Dapat dikatakan bahwa efektivitas sangat bergantung pada faktor eksternal dan internal organisasi (Monoarfa, 2012).

Menurut Daft (Yuniningsih & Kharisma, 2014) mengatakan bahwa efektivitas organisasi adalah sebagai tingkat keberhasilan organisasi jika dalam usahanya dapat mencapai tujuan dan sasarannya. Pendekatan sasaran mengemukakan bahwa efektivitas organisasi diukur atau dinilai berdasarkan hasil akhir atau pencapaian. Efektivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas kerja pegawai/perorangan (Purnomo et al., 2006)

Dari deskripsi diatas tentang efektifitas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dijelaskan bahwa efektivitas organisasi oleh Steers (dalam Irawati, 2013:7) memiliki kata kunci efektivitas yaitu efektif dan diartikan kuantitas atau kualitas keluaran (output) dari suatu proses penyelenggaraan organisasi.



## B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi

Steers (dalam Purnomo et al., 2006; 37-40) berpendapat, terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu karakteristik/ciri organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja, dan kebijakan/praktek manajemen. Penjelasannya sebagai berikut:

- a) Karakteristik organisasi, terdapat di dalam struktur organisasi yang mempunyai hubungan relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia. Dalam struktur organisasi, karyawan yang ditempatkan dalam hubungan yang relatif tetap akan menentukan pola interaksi dan perilaku berorientasi dalam tugas.
- b) Karakteristik lingkungan. Karakteristik ini mencakup:
  - 1) Lingkungan ekstern  
yaitu lingkungan yang berada di luar organisasi dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap organisasi, terutama dalam pengambilan keputusan dan pengambilan tindakan.
  - 2) Lingkungan intern  
yaitu lingkungan yang secara keseluruhan berada di dalam organisasi yang dikenal dengan iklim organisasi.
- c) Karakteristik pekerja, merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Setiap individu memiliki banyak perbedaan, namun persepsi individu terhadap perbedaan tersebut menjadi penting dalam mencapai tujuan organisasi. Ketika sebuah organisasi mampu mengintegrasikan

tujuan pribadinya dengan tujuan organisasi, maka organisasi akan semakin dekat dengan keberhasilan.

- d) Karakteristik manajemen, merupakan strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua hal yang ada di dalam organisasi guna mencapai efektivitas. Kebijakan dan praktek manajemen dapat digunakan sebagai alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan aspek karyawan, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, penciptaan lingkungan berprestasi, proses komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Faktor-faktor yang telah dijelaskan tersebut berfungsi untuk memperdalam kajian-kajian efektivitas organisasi yang telah diuraikan. Tidak cukup sebatas kajian-kajian dan faktor-faktor efektivitas organisasi saja, untuk mengetahui tingkat efektivitas organisasi indikator-indikator dari efektivitas organisasi perlu dikaji pula. Berikut adalah indikator-indikator pada efektivitas organisasi.

### C. Indikator-indikator Efektivitas Organisasi

Pada indikator ini berdasarkan teori Duncan (dalam Steers 1985; 53), terdapat 3 (Tiga) wujud yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi, diantaranya:

## 1. Pencapaian Tujuan

Proses pencapaian tujuan harus dianggap sebagai keseluruhan usaha. Oleh karena itu diperlukan tahapan-tahapan untuk menjamin tercapainya tujuan akhir, baik dari segi proses yang terlibat dalam penyelesaian komponen maupun dari segi periodisasi. Keberhasilan tujuan bergantung pada sejumlah faktor, yaitu: (1) dasar hukum, (2) sasaran atau target dan (3) ketepatan waktu.

## 2. Integrasi

Integrasi merupakan ukuran kapasitas organisasi untuk terlibat dalam proses mekanisme atau menyelaraskan prosedur standar operasi dan keterlibatan dengan berbagai organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) prosedur dan (2) keterlibatan.

## 3. Adaptasi

Adaptasi merupakan kapasitas organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan beradaptasi merupakan suatu kemampuan untuk mengubah atau mampu menciptakan pembaharuan dengan mengikuti perkembangan sebagai respons terhadap perubahan lingkungan serta. Adaptasi mencakup beberapa tolak ukur, yaitu: (1) perubahan, dan (2) sarana prasarana.

### **1.6.2 Kemiskinan**

#### A. Definisi Kemiskinan

Supriatna (dalam Kadji, 2004) mengemukakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Dengan rendahnya tingkat struktural, produktivitas, pendapatan, gizi dan kebahagiaan, yang menunjukkan adanya lingkaran ketidakberdayaan menjadi

tanda yang dapat dikatakan penduduk miskin. Kemiskinan dapat dikaitkan dengan keterbatasan sumber daya manusia, baik di struktural formal maupun informal, yang mengakibatkan rendahnya tingkat struktural informal. Terdapat lima karakteristik penduduk miskin (Kadji, 2004) yaitu: (1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri, (2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, (3) Tingkat pendidikannya rendah, (4) Tidak atau kurangnya mempunyai fasilitas, (5) Tidak mempunyai keterampilan atau struktural yang memadai di usia muda.

Kemiskinan meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi aspek primer dan sekunder (Kadji, 2004). Aspek utama adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek kedua adalah jaringan sosial yang buruk, sumber daya keuangan dan informalitas, seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan struktural yang buruk. Lahirnya kemiskinan adalah sebagai dampak dari adanya proses pembangunan yang tidak mencapai target pada sebuah perbaikan sosial (Itang, 2015).

## B. Dimensi Kemiskinan

Soemardjan (dalam Sumodingrat 1999:81), mendeskripsikan berbagai cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda, dengan tetap memperhatikan dua kategori tingkat kemiskinan sebagai berikut (Kadji, 2004): Pertama, kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kedua, kemiskinan relatif adalah

penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena terkait dengan distribusi pendapatan antar kelas dalam masyarakat.

David Cox (2004: 1-6) dibagi kemiskinan dalam beberapa dimensi, yaitu:

1. Kemiskinan akibat globalisasi. Globalisasi menciptakan ada yang menang dan juga ada yang kalah. Pada umumnya, pemenangnya ialah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang disisi lain sering merasa terpinggirkan oleh persaingan pasar bebas.
2. Kemiskinan pembangunan. Kemiskinan subsistensi (miskin karena pembangunan rendah), kemiskinan pedesaan (miskin karena daerah pedesaan terpinggirkan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (miskin karena sifat dan kecepatan pertumbuhan kota).
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh anak-anak, perempuan, dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan muncul sebagai akibat dari peristiwa lain atau adanya faktor eksternal, seperti konflik, bencana alam, perusakan lingkungan dan lebihnya jumlah penduduk.

#### C. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Kuncoro (dalam Itang, 2015) terdapat beberapa faktor penyebab kemiskinan yaitu:

1. Pada tingkat makro, kemiskinan muncul dari distribusi kepemilikan sumber daya yang tidak merata, yang mengarah pada distribusi pendapatan yang

tidak merata, dengan orang miskin memiliki sumber daya yang terbatas dan memiliki kualitas yang rendah.

2. Kemiskinan timbul karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia yang rendah yang berarti produktivitas rendah, upahnya juga rendah.
3. Kemiskinan timbul karena adanya perbedaan pada akses dan modal. Akibat dari keterbatasan dan kurangnya akses, masyarakat memiliki pilihan yang terbatas (bahkan tidak ada) untuk mengatur hidup mereka selain melakukan apa yang saat ini harus mereka lakukan (bukan apa yang seharusnya mereka lakukan). Oleh karena itu, manusia mempunyai keterbatasan dalam mengambil keputusan, sehingga menghambat potensi manusia untuk mengembangkan kehidupannya. Kemiskinan juga timbul karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena jika kualitas manusianya rendah pasti akan mempengaruhi yang lain, seperti pendapatan.

Dalam hal ini kemiskinan juga banyak dihubungkan dengan:

1. Penyebab individu atau patologis yang memandang kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan atau kemampuan.
2. Penyebab keluarga, hubungan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
3. Penyebab subkultur (sub-budaya) yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari yang dipelajari atau dilakukan di lingkungan.
4. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari tindakan orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.
5. Penyebab struktural yang menetapkan bahwa kemiskinan adalah hasil dari struktur sosial.

### **1.6.3 Sustainable Development Goals (SDGs)**

Sustainable Development Goals (SDGs) suatu upaya pembangunan berkelanjutan yang menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Dengan berakhirnya MDGs yang telah berhasil mengurangi hampir separuh kemiskinan dunia, maka lahirlah Sustainable Development Goals (SDGs) dalam pertemuannya pada 25 – 27 September 2015 di United Nations Headquarters (PBB), New York, Amerika Serikat. Sustainable Development Goals (SDGs) dirancang kelanjutan dari Millinium Development Goals (MDGs), yang belum tercapai tujuannya sampai pada akhir 2015.

SDGs menangani isu-isu pembangunan secara lebih keseluruhan, baik secara kualitatif (dengan mempertimbangkan isu-isu yang tidak tercakup dalam MDGs) maupun secara kuantitatif dengan memberi target untuk tujuan dan sasaran (Y. C. Pratama, 2014). SDGs bersifat universal, dengan memberikan peran yang seimbang bagi semua negara, baik negara maju, negara berkembang maupun negara kurang berkembang untuk berkontribusi penuh dalam pembangunan, sehingga setiap negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dengan negara lain dalam mencapai SDGs.

SDGs memiliki beberapa tujuan, termasuk memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk segala usia, di antara hasil pengentasan kemiskinan. “*No One Left Behind*” adalah prinsip utama SDGs ([sdg2030indonesia.org](http://sdg2030indonesia.org)). Pada prinsip terakhir ini ialah yang menjamin bahwa pelaksanaan SDGs harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan dan pelaksanaannya melibatkan pemangku kepentingan (Aulia, 2020).

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memuat kebijakan nasional lebih lanjut terkait penanggulangan kemiskinan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) terdapat 17 tujuan sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang mencakup:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



Gambar 1. 2 Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)



Sumber: [sdgs.bappenas.go.id](https://sdgs.bappenas.go.id)

Kemudian terdapat empat pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs di Indonesia yaitu:

1. Pilar Pembangunan Sosial mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5
2. Pilar Pembangunan Ekonomi mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17
3. Pilar Pembangunan Lingkungan mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu untuk Tujuan 16

SDGs Indonesia untuk Pilar Pembangunan Sosial sangat terkait dengan pencapaian pembangunan di bidang pengentasan kemiskinan, yang terdiri dari tujuan (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; dan (5) Kesetaraan Gender. Kelima tujuan itu berkaitan erat dengan pencapaian pembangunan dalam bidang penanggulangan kemiskinan.

SDGs diharapkan dapat berkontribusi pada kemanusiaan dan terutama untuk mempererat perdamaian bagi seluruh masyarakat internasional dalam kebebasan yang luas dan mereka diharapkan mengatasi kemiskinan dalam tantangan global saat ini dan merupakan premis yang tidak berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.

#### **1.6.4 Pemerintahan Daerah**

##### **A. Definisi Pemerintahan Daerah**

Menurut [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini tertuju pada urusan bidang sosial yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Mengenai kewenangan daerah dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan, daerah telah diberi kewenangan untuk mengatasi kemiskinan dan hal itu adalah urusan bidang sosial. Dalam hal ini, penanggulangan kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah ini mengacu pada

kewenangan administratif di daerah yang lebih kecil dimana Negara Indonesia adalah negara yang wilayahnya dibagi menjadi daerah provinsi. Wilayah provinsi dibagi lagi menjadi wilayah kabupaten dan wilayah perkotaan. Setiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang di tentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Daerah otonom adalah badan hukum masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berhak, berwenang dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan otonomi daerah, setiap daerah memiliki kebebasan untuk mengembangkan program dan menyerahkannya kepada pemerintah pusat. Maka dari itu, hal ini akan berdampak sangat positif dan dapat mendorong bidang ke depan jika setiap orang atau instansi yang menyusun memiliki kapasitas yang baik dalam merencanakan suatu program dan memiliki analisis tentang apa yang akan terjadi di masa depan.

#### B. Organisasi Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan otonomi daerah yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, serta mengelola sumber daya alam suatu daerah

diperlukannya suatu tugas yang tepat, efektif, dan efisien sehingga visi dan misi suatu daerah dapat dicapai. Pembagian dilakukan oleh daerah dengan perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah tersebut selanjutnya disebut perangkat daerah dan diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (Lima) elemen, yaitu kepala daerah (*strategic apex*), sekretaris daerah (*middleline*), dinas daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staff pendukung (*supporting staff*).

Wilayah Kabupaten atau Kota dibentuk kecamatan sebagai perangkat daerah untuk melaksanakan fungsi koordinasi daerah dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan berintensitas tinggi. Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala insektorat dan camat atau nama lain di Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi dari sekretaris daerah dalam pertanggungjawaban ini hanya fungsi pengawasan administratif untuk memverifikasi keakuratan administratif pertanggungjawaban oleh kepala dinas dan kepala badan. Dasar utama pembentukan perangkat daerah yaitu adanya pelayanan publik yang diserahkan kepada daerah, terdiri dari urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang terpilih untuk pelayanan dasar. Pemerintah daerah mengutamakan pelaksanaan tugas pokok administrasi yang berkaitan dengan pelayanan dasar agar kebutuhan dasar masyarakatnya dapat terpenuhi secara optimal.

Perangkat daerah di bentuk dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti luas daerah, jumlah penduduk, kekuatan keuangan daerah, dan tingkat beban kerja menurut urusan pemerintah, dan diserahkan kepada daerah sebagai sebuah perintah untuk dilaksanakan pada masing-masing daerah melalui perangkat daerah. Dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan ketertiban lembaga daerah, pemerintah pusat memberikan bantuan, dukungan, arahan, bimbingan, pengawasan, pelatihan dan kerjasama, sehingga tercapainya sinkronisasi dan penyederhanaan yang optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **1.7 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep pada penelitian. Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

### **1.7.1 Efektivitas**

Menurut Duncan (dalam Steers 1985; 53), terdapat 3 (Tiga) wujud yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

### **1.7.2 Kemiskinan**

Badan Pusat Statistik mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk kehidupan yang jauh lebih layak, baik dengan kebutuhan makanan maupun non makanan.

### **1.7.3 Sustainable Development Goals (SDGs)**

Sustainable Development Goals (SDGs) menangani masalah pembangunan secara menyeluruh, baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk menuju pencapaian penuh tujuan dan target. Sustainable Development Goals menjadi sebuah dokumen kesepakatan pembangunan global untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan dalam proses pembangunan.

### **1.7.4 Pemerintahan Daerah**

Menurut [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah merupakan suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

## **1.8 Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. 2 Definisi Operasional Penelitian

Variabel	Indikator	Parameter
Pencapaian Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar Hukum</li> <li>- Sasaran atau Target</li> <li>- Ketepatan Waktu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya dasar pemikiran organisasi dibentuk melalui SK Bupati Tana Tidung Nomor 188.4.55/210/K-V/2022</li> <li>- Kemampuan dalam pelaksanaan tugas dalam mencapai sasaran yang terarah untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan sesuai dengan tujuan SDGs</li> <li>- Mampu menyelesaikan pada waktu yang ditentukan dimana dengan target akhir pembangunan berkelanjutan</li> </ul>
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlibatan</li> <li>- Prosedur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan program menelaraskan perilaku keterlibatan stakeholder dalam mengatasi kemiskinan untuk pembangunan berkelanjutan</li> <li>- Kemampuan menelaraskan prosedur standar operasional</li> </ul>
Adaptasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan Sarana dan prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu menciptakan atau melakukan pembaharuan dengan hasil pengentasan kemiskinan</li> <li>- Proses yang mendukung sebagai penunjang keberhasilan proses untuk mencapai SDGs</li> </ul>

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Mengenai metode penelitian kualitatif, menurut Rukin (2019), mendefinisikannya sebagai suatu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Sedangkan menurut Nugrahani (2014) penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, terdapat lima pendekatan yang biasanya digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data. Lima pendekatan tersebut adalah pendekatan naratif, fenomenologis, *grounded theory*, etnografi dan studi kasus dari beberapa pendekatan tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus karena memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Menurut (Al-Hamdi et al., 2020), pendekatan studi kasus mengkaji suatu kasus, keputusan, atau lebih (membandingkan) dalam sebuah kehidupan nyata yang sedang terjadi untuk suatu tujuan tertentu, dengan mengumpulkan data secara detail dan mendalam melalui berbagai sumber informasi, seperti observasi, wawancara, dokumen, laporan, arsip dan audiovisual.

### **1.9.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tana Tidung yang saat ini sekretariat



TKPK berada di Bappeda dan Litbang KTT yang beralamat di Jl. Perintis KM 1 Kompl. RSU. Penelitian ini difokuskan pada efektivitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam mengurangi tingkat kemiskinan dalam mewujudkan SDGs.

### **1.9.3 Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian ini sumber data merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data nantinya akan dijadikan sebagai sumber data yang nantinya akan menentukan kualitas penelitian, maka dari itu peneliti mempunyai dua sumber data yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari subjek penelitian data primer diperoleh dengan menggunakan instrument langsung yang telah ditetapkan sebelumnya, sumber data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang yang bersangkutan dengan penelitian. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Sehingga dapat diperoleh data-data dan informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data pendukung data primer yang diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan dengan data primer seperti studi terdahulu, atau bahan bacaan yang berkaitan dengan data yang hendak di cari. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen yang bersumber dari internet, buku, jurnal yang berkaitan dengan judul peneliti.

#### 1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015) teknik pengumpulan data adalah tujuan utama penelitian dalam mendapatkan data dengan langkah teknis yang strategis dalam proses penelitian. Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan pengumpulan data terkait dengan Efektivitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tana Tidung untuk Mengurangi Kemiskinan dalam Mewujudkan SDGs.

##### 1. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi secara langsung tatap muka atau luring (Yusuf, 2014).

Tabel 1. 3 Informan Wawancara

No	Nama	Instansi/Jabatan
1.	Bapak Herson	Kepala BAPPEDA dan Litbang KTT sebagai Sekretaris TKPKD KTT
2.	Bapak Alvian, ST	Staff Pengembangan Wilayah BAPPEDA sebagai Analisis Pengembangan Wilayah TKPKD KTT
3.	Bapak Eko Rizqi Mauldhan, ST	Fungsional Perencanaan Ahli Muda TKPKD KTT
4.	Bapak Dimas Aryandita, S.Sos	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat TKPKD KTT
5.	Bapak Saqua Nazarisman, ST	Staff Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama
6.	Ibu Vamelia Ibrahim, SE	Ketua TP PKK sebagai anggota TKPKD
7.	Bapak Ir. Hadi Aryanto, ST., MT	Kepala Dinas PUPRPKP sebagai anggota TKPKD

## 2. Dokumentasi

Menurut Al-Hamdi et al., (2020) teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti melalui peninggalan arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber data yang juga bisa dipakai dalam studi dokumentasi adalah melalui media online, seperti portal berita, youtube, media sosial dan lain sebagainya.

### 1.9.5 Teknik Analisis Data Penelitian

Menurut Moleong (2011: 248), analisis data merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilih dan memilah, mencari dan menemukan pola dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif. Data-data yang telah diperoleh dari berbagai macam cara (wawancara dan observasi) akan di proses terlebih dahulu sebelum digunakan.

Terdapat 4 langkah dalam analisis data menurut (Al-Hamdi et al., 2020) yaitu pengumpulan dan pengolahan data, seleksi data, analisis antar variable dan verifikasi data, dan penafsiran dan penarikan kesimpulan.

#### a) Pengumpulan dan pengolahan data

Data-data yang telah diperoleh baik dari studi dokumentasi, wawancara dan observasi akan dikelola sesuai dengan kebutuhan penelitian. Peneliti juga akan menyalin hasil rekaman suara menjadi teks dan selanjutnya memilih data-data tersebut sesuai dengan indikator-indikator yang sudah ditentukan sebelumnya.

b) Seleksi data

Pada tahap ini, data-data yang telah disusun sesuai dengan kategori, akan dipilih dan dipilah kembali data yang berguna dan sesuai untuk digunakan dalam proses analisis.

c) Analisis antar variabel dan verifikasi data

Langkah selanjutnya setelah seleksi data adalah menghubungkan antara satu variabel atau indikator dengan variabel atau indikator lainnya.

d) Penafsiran dan penarikan kesimpulan

Segala temuan yang telah disajikan, selanjutnya akan ditafsirkan sebagai usaha untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan diatas. Hasil tafsiran tersebut kemudian menjadi dasar dari peneliti untuk menarik kesimpulan dari rangkaian penelitian secara keseluruhan.

Gambar 1. 3 Langkah dalam Analisis Data



*Sumber : (Al-Hamdi et al., 2020)*